

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BINJAI SMART CITY  
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BINJAI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**IGA CYNTIA PUTRI**  
**NPM 1503100094**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

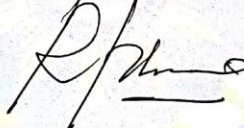
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : IGA CYNTIA PUTRI  
NPM : 1503100094  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BINJAI SMART CITY DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

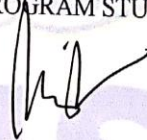
Medan, 14 Maret 2019

PEMBIMBING



**RAFDINAL, S.Sos, M.AP**

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI



**NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

DEKAN



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : IGA CYNTIA PUTRI  
NPM : 1503100094  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019  
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si (.....)  
PENGUJI II : BANGUN NAPITUPULU, Drs, M.Si (.....)  
PENGUJI III : RAFDINAL, S.Sos, M.AP (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Iga Cyntia Putri  
NPM : 1503100094  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Bagian : Ilmu Administrasi Publik/ Kebijakan  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun  
2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas  
Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 3 Maret 2019

Saya yang menyatakan,  
  
**Iga Cyntia Putri**  
NPM : 1503100094

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BINJAI SMART CITY DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

**IGA CYNTIA PUTRI**

**NPM: 1503100094**

*E-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dan dengan pihak luar yang diharapkan mampu meningkatkan *performance* pemerintahan dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan kualitas pemerintahan. Melalui pemanfaatan teknologi *e-government* bertujuan juga dalam pembangunan Kota dan penerapan *Smart City* (Kota Cerdas) yang tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyedia layanan yang dominan dan memegang kendali. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai telah merealisasikan sebuah program *Smart City* yang bertujuan mendorong pemaksimalan informasi, teknologi untuk mewujudkan *Good Local Governance*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai *Smart City* Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif diperoleh dengan wawancara dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan dari program Binjai *Smart City* belum terlaksana sepenuhnya dengan efektif, dikarenakan belum tercapainya tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dan mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan. Pemerintah Kota Binjai yaitu Walikota, Sekretaris Daerah, OPD (Ogranisasi perangkat daerah), dan berbagai Dinas- dinas, beberapa pihak yaitu dari Politeknik Negeri Medan, PT. Telkom dan PLN, terkait dalam pelaksanaan Binjai *Smart City* saling bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Binjai *Smart City*, aplikasi-aplikasi ERa, Emasyarakat, Edokter, Eperizinan, Emusrenbang, dll, adalah program dari penyelenggaraan Binjai *Smart City* merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai untuk memudahkan birokrasi pemerintahan berbasis teknologi *online*, Binjai *Smart City* telah memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu, masyarakat dapat lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Binjai.

**Kata Kunci** : E-government, Smart City, Binjai Smart City, Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Binjai

## KATA PENGANTAR



*Assalaamua'laikum warahmatullahi wabarakaatuh*

Syukur alhamdulillah rabbal alamin atas kehadiran Allah subhannawataAllah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberikan rahmat, kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke jaman alam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai**

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi

dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Yang istimewa kepada kedua orang tua Ibu, Ayah, dan Adik saya yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan do'a, dan dukungan, serta bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah., S.IP., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Rafdinal., S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.
9. Kepada teman yang memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya, Sri Hariyati, Nurul Cholijah Harahap, Mayzatul Hanisa, dan Angga Kurniawan.
10. Kepada teman-teman kelas C-Sore Ilmu Administrasi Negara yang selama perkuliahan memberikan banyak dukungan dan semangat serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya, Evangelista Pardede, Rudi Syaputra, Putra Wijaya, Aulia Fitria Suchi, dan Randi Permana.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, kiranya Allah SWT membalas kebaikan atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 9 Maret 2019

Penulis

**IGA CYNTIA PUTRI**  
NPM:1503100094



## DAFTAR ISI

### HALAMAN

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
2.1 Pengertian Implementasi .....	10
2.2 Pengertian Kebijakan .....	11
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	12
2.4 Tujuan Kebijakan .....	13
2.5 Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	13

2.6 Unsur-Unsur Kebijakan Publik .....	15
2.7 Ciri-Ciri Kebijakan Publik .....	16
2.8 Evaluasi Suatu Kebijakan Publik .....	17
2.9 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	17
2.10 Pengertian Penyelenggaraan .....	20
2.11 Pengertian E-Government .....	20
2.12 Tujuan E-Government .....	21
2.13 Pengertian Smart City .....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Kerangka Konsep .....	24
3.3 Definisi Konsep .....	26
3.4 Kategorisasi .....	27
3.5 Narasumber .....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.7 Teknik Analisis Data .....	29
3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	29
3.8.1 Kondisi Geografis Kota Binjai .....	29
3.8.2 Visi Dan Misi Kota Binjai .....	32
3.8.3 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai .....	33
3.8.4 Susunan Organisasi Dinas .....	36

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 HASIL PENELITIAN .....	37
4.1.1 Penyajian Data .....	37
4.1.2 Deskripsi Narasumber .....	37
4.1.3 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin .....	38
4.1.4 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Umur .....	39
4.1.5 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Pekerjaan .....	39
4.2 PEMBAHASAN .....	40
4.2.1 Program Binjai Smart City .....	40
4.2.2 Deskripsi Hasil Wawancara .....	44
4.2.3 Analisis Hasil Wawancara .....	56

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan .....	64
5.2 Saran .....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-I Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-III Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK- IV Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-V Berita Acara Bimbingan
Lampiran VIII	: SK-VI Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: SK-VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
Lampiran X	: SK-X Undangan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Surat Izin Riset
Lampiran XII	: Surat Balasan

## DAFTAR TABEL

	<b>HALAMAN</b>
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin .....	38
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Umur .....	39
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan .....	40
Tabel 4.4 Jenis Aplikasi 2018 .....	50
Tabel 4.5 Jenis Aplikasi 2017 .....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

### **HALAMAN**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai .....	36
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia sudah semakin maju dalam dunia IT (Teknologi Informasi), di era ini merupakan era yang dapat mempermudah manusia untuk mendapatkan informasi dalam waktu yang relatif cepat. Semakin banyaknya informasi yang diserap maka manusia akan menjadi tahu dunia yang diketahuinya, bentuk ini dapat mempermudah komunikasi manusia dibelahan bumi yang jauh sekalipun. Informasi dalam sektor publik di Indonesia berkembang cukup baik dengan semakin banyaknya pengguna teknologi informasi, dalam dunia pemerintahan dan tatakelola sistem informasi manajemen ini dikenal juga dengan *elektronik government*.

Salah satu ciri era demokratis yang sudah maju adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan tersebut telah menjadi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat seiring dengan proses demokratisasi itu sendiri, transparansi, dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi ini pulalah yang menjadi penciri dari penyelenggaraan *good governance* yang diimpikan masyarakat Indonesia.

Dalam ranah publik, informasi memiliki arti penting dan peran strategis terutama untuk menghadapi perubahan masyarakat serba cepat, situasi yang tidak pasti, serta mengurangi *anxiety* (kecemasan). Bagi seseorang ataupun organisasi, informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan diri, memberikan

*added value*, sera membantu untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan masyarakat dan lingkungan. Tanpa dukungan informasi, seseorang ataupun organisasi tidak akan mungkin mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan

Indonesia merupakan negara yang telah menggunakan internet dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya. Melalui internet, pemerintah dapat menyampaikan informasi maupun pelayanan kepada masyarakat demi kemudahan masyarakat dalam hidup bernegara. Sehingga saat ini, sebuah negara, khususnya Indonesia sudah jarang menggunakan sistem manual ataupun tradisional dikarenakan perkembangan zaman yang serba cepat dan canggih. Perkembangan teknologi yang pesat ini mengharuskan Pemerintah harus tanggap dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, mudah, nyaman dan terpercaya. Ini terlihat beberapa tahun terakhir ini, dimana pelayanan pemerintah berbasis internet atau *online* mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Di era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance*, pemerintah menerapkan konsep penyelenggaraan peran pemerintah dengan sistem yang lebih baik demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Konsep tersebut seperti halnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di dalam sebuah pemerintahan yang sering disebut dengan Elektronik Pemerintahan (*e-Government*).

Informasi bukanlah sekedar keterangan yang diberikan seseorang ataupun badan publik. Informasi adalah fakta, data, berita-berita, atau keterangan-



keterangan yang telah diperoleh sebaik-baiknya agar memiliki arti dan nilai penting bagi seseorang atau organisasi.

Pemerintah memiliki peranan untuk melaksanakan fungsi pelayanan warga negara. Untuk mengimplementasikan fungsi tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, dan pembangunan dalam berbagai bidang layanan itu disediakan di berbagai lembaga atau institusi pemerintah dengan aparat sebagai pemberi layanan secara langsung kepada masyarakat.

Mekanisme untuk mendapatkan layanan informasi setiap badan publik haruslah tetap memprioritaskan kualitas informasi dan pelayanan. Dan secara teknik, kualitas pelayanan juga mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, sederhana, dan biaya ringan. Untuk mewujudkan layanan yang berkualitas, ketentuan dalam pasal 13 UU KIP (Keterbukaan informasi publik) mengisyaratkan bahwa setiap badan publik menunjuk PPID (Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) dengan tugas mengembangkan sistem penyedia layanan terstandardisasikan secara nasional.

*E-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dan dengan pihak luar yang diharapkan mampu meningkatkan *performance* pemerintahan dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan kualitas pemerintahan. Hal ini bisa dibuktikan, bahwa semakin maju suatu negara, maka semakin tinggi tingkat aplikasi *e-government*.

Menurut Rohman, Saiful dan Purnomo 2008, kaitanya dengan *e-government* selain memudahkan birokrasi pemerintahan berbasis teknologi online, hal ini juga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah, instansi maupun lembaga yang diinginkan masyarakat.

Pengembangan *e-government* mengacu pada INPRES No. 3 Tahun 2003, yaitu tentang melaksanakan strategi keenam dengan melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur. Semenjak dikeluarkan instruksi presiden saat itu, hampir seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki banyak kemajuan dengan menampilkan sistem pemerintahan melalui *online*.

Pada praktiknya *Good Governance* dalam meningkatkan pelayanan publik terutama melalui pemanfaatan teknologi *e-government* bertujuan juga dalam pembangunan Kota dan penerapan *Smart City* (Kota Cerdas) yang tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai penyedia layanan yang dominan dan memegang kendali.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Binjai dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai telah merealisasikan sebuah program *Smart City* yang bertujuan mendorong pemaksimalan informasi, teknologi untuk mewujudkan *Good Local Governance*. Kota Binjai menjadi Kota pertama dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang telah menerapkan *Smart City*. Dalam acara *soft launching e-government Binjai Smart City*, Jumat (2/12/16), di Aula kantor Walikota Binjai di Jalan Jenderal Sudirman, Walikota

Binjai H. Muhammad Idham, SH, M.Si mengatakan “Soft launching menjadi babak baru bagi terciptanya peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat dan dunia usaha di Kota Binjai yakni pelayanan yang lebih modern dengan sistem yang lebih akuntabel, transparan, demokratis, dan lebih interaktif”.

Pemerintah Kota Binjai akhirnya resmi menerapkan konsep *smart city* dalam meningkatkan pelayanannya kepada rakyat. Penerapannya ditandai acara *grand launching e-government* dan peresmian gedung Binjai *Command Center* yang berlangsung di Binjai, Kamis sore (30/03/2017).

Walikota Binjai Walikota Binjai H. Muhammad Idham, SH, M.Si mengiringi acara *grand launching e-government* itu. Peluncuran disaksikan langsung Gubsu Tengku Erry Nuradi, Wakil Ketua KIP (Keterbukaan informasi publik) Sumut Mayjen Simanungkalit, Walikota Medan, Bupati Serdang bedagai, pejabat mewakili Menteri Dalam Negeri dan tokoh penting lainnya. Diluncurkan lima aplikasi online layanan masyarakat untuk mewujudkan Kota Binjai sebagai *Smart City* (kota cerdas). Kelima aplikasi tersebut yakni aplikasi e-Masyarakat yang memungkinkan warga Binjai dapat melaporkan semua permasalahan secara online. Aplikasi e-Musrenbang yang merupakan aplikasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari kepling hingga pemerintah kota.

Aplikasi e-RA merupakan aplikasi rencana dan anggaran. Kemudian, aplikasi e-Dokter merupakan aplikasi sistem pendaftaran pasien pada RSUD. Aplikasi e-Perizinan merupakan layanan perizinan di bawah PMPPTSP (Pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu) Kota Binjai, dengan penerapan konsep *smart city* ini, maka setelah *grand launching* kelima aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mendownload dari aplikasi *playstore* saja.

Dalam acara *Soft Launching* tersebut, Pemerintah Kota Binjai melaksanakan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Binjai dengan Politeknik Negeri Medan dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Divisi Regional I Sumatera Witel Medan tentang pembangunan Binjai *Smart City* (BSC).

Namun disamping kemudahan yang didapat dari aplikasi- aplikasi ini, ternyata dalam pelaksanaannya satu tahun belakangan ini terdapat beberapa masalah yang seharusnya perlu secepatnya ditangani pemerintah apabila program *Smart City* tersebut ingin terus berjalan. Ketua LSM Hijau, Ikhsan, Sabtu (12/8/17) mengatakan bahwa salah satu penyebab tidak maksimalnya program Binjai *Smart City* (BSC) disebabkan kurangnya sosialisasi Pemerintah Kota Binjai, apalagi pada lapisan masyarakat kebawah. Ikhsan juga menilai Pemerintah Kota Binjai seperti tidak siap dalam pelaksanaan Binjai *Smart City* (BSC) tersebut. Kemudian banyaknya hal yang masih dilakukan secara manual dikarenakan Aplikasi Binjai *Smart City* (BSC) tidak bisa diakses.

Meskipun Pemerintah Kota Binjai bekerja semaksimal mungkin dalam mengupayakan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui aplikasi e-Masyarakat, namun sejumlah kelemahan masih saja ditemukan. Hal itu dinilai wajar, mengingat aplikasi ini juga masih terbilang baru diperkenalkan.

Kenyataan di lapangan, masih terdapat masyarakat yang kecewa disebabkan laporan yang mereka kirim melalui aplikasi e-Masyarakat tidak mendapat tanggapan dari instansi terkait. Bahkan ada yang mengaku sudah berkali-kali membuat laporan namun belum mendapat tanggapan, selain itu masyarakat juga mengeluhkan lambatnya respon dari operator terkait pengaduan masyarakat, dimana pengaduan tersebut membutuhkan respon cepat dari pemerintah.

Untuk ke depannya, diharapkan kepada Pemerintah Kota Binjai lebih memperhatikan pengaduan masyarakat, yang membutuhkan respon cepat, dan kesigapan operator. Dengan demikian, aplikasi e-Masyarakat bisa benar-benar berfungsi optimal sebagai lumbung informasi publik bagi masyarakat Kota Binjai.

Mengingat hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas tujuan dan sasaran dari implementasi Binjai *Smart City* serta berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran kebijakan dalam meningkatkan pelayanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran di dinas komunikasi dan informasi di kota Binjai.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan meningkatkan pelayanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran di dinas komunikasi dan informatika di kota Binjai.
3. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan terkait dengan Implementasi Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, kebijakan, kebijakan publik, tujuan kebijakan, tahap-tahap kebijakan publik, unsur-unsur kebijakan publik, ciri-ciri kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, penyelenggraan, E-government, tujuan E-government, dan Smart City.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, tinjauan ringkas objek penelitian, visi dan misi dinas komunikasi dan informatikan kota binjai.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis wawancara.

### **BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Menurut Gordon dalam Pasolong (2016: 24) mendefenisikan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Zainal Abidin (2016: 25) mendefenisikan implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang ditetapkan melalui strategi implementasi kebijakannya mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Hon (1975: 45) mendefenisikan implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok untuk mencapai tujuan.

Menurut Grindle dalam Haedar (2016: 47) mendefenisikan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan dengan



harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

## **2.2 Pengertian Kebijakan**

Menurut Carl Fredrich (2004: 3) mendefenisikan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Jenkins (2004: 4) mendefenisikan kebijakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Menurut James E Anderson (2004 :2) mendefenisikan kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah ataupun persoalan tertentu yang dihadapi.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

### 2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Aminullah dalam Muhammadi (2001:371-372) mendefinisikan kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2016: 36) mendefinisikan “*Public Policy is whatever the government chose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan suatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Menurut James E. Anderson (2004: 17) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Menurut Thoha (2012: 51) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat, *stakeholder* dalam mengelola negara adalah aktor negara atau pemerintah dan publik dalam arti masyarakat dan rakyat adalah objek dan sasaran dari kebijakan negara atau pemerintah.

Dari definisi kebijakan publik di atas oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekelompok orang maupun masyarakat untuk

dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan nilai yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan.

## **2.4 Tujuan kebijakan**

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu;

1. Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator)
2. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai stimulator)
3. Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai koordinator)
4. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara sebagai distributor).

## **2.5 Tahap-tahap Kebijakan Publik**

Menurut William Dunn mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis kebijakan publik yang harus dilakukan yaitu:

1. Agenda Setting (Agenda Kebijakan)

Tahap penetapan agenda kebijakan ini adalah penentuan masalah publik yang akan dipecahkan, dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

## 2. Policy Formulation (Formulasi Kebijakan)

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik untuk menentukan kebijakan pada tahap ini menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan dimana keputusan yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba terbatas.

## 3. Policy Adoption (Adopsi Kebijakan)

Merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan yang akan dilakukan. Terdapat di beberapa hal yaitu identifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan juga mengidentifikasi alternatif-alternatif dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar daripada efek negatif yang akan terjadi

## 4. Policy Implementation (Implementasi Kebijakan)

Pada tahap ini implementasi kebijakan lebih dilakukan oleh unit- unit eksekutor (birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen). Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program.

## 5. Policy Assesment (Evaluasi Kebijakan)

Tahap akhir dari sebuah proses kebijakan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang ditentukan atau direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran (kriteria-kriteria yang telah ditentukan).

### **2.6. Unsur-Unsur Kebijakan Publik**

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan formalisasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu :

1. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
2. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.
3. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat

suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.

4. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
5. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini antara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

## **2.7 Ciri-Ciri Kebijakan Publik**

Menurut Zainal Abidin (2012: 23) mendefinisikan ciri-ciri kebijakan publik yaitu:

1. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya pembuatan kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
2. Kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk pemerintah

4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

## **2.8 Evaluasi Suatu Kebijakan Publik**

Menurut Hamdi (2014: 107) mendefenisikan evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan publik. Secara umum menyatakan ada empat alasan mengapa evaluasi harus dilakukan, yaitu :

1. Evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan program yang sedang berlangsung dan mengestimasi kemanfaatan upaya-upaya untuk memperbaikinya.
2. Evaluasi dilakukan untuk menaksir kemanfaatan dari inisiatif dan program yang bersifat inovatif.
3. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan administrasi dan manajemen program.
4. Evaluasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas.

## **2.9 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Adam Smith dalam Islamy (2001: 16) mendefenisikan implementasi kebijakan publik adalah sebagai suatu proses atau alur. Proses implementasi kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Van Meter dan Van Horn (2016: 47) mendefinisikan implementasi kebijakan publik tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Edward dalam Indiahono, Dwiyanto (2016: 28) mendefinisikan Model implementasi kebijakan publik menunjuk pada empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi secara efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
2. Sumberdaya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atau sebuah program atau kebijakan yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik.
3. Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program atau kebijakan.



4. Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi itu sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standard operating procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang jelas dan sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksananya sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

## **2.10 Pengertian Penyelenggaraan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelenggaraan merupakan proses, cara, perbuatan dalam berbagai arti seperti pelaksanaan dan penunaian. Dalam hal ini penyelenggaraan berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi seluruh penyelenggaraan negara dan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik, dan masyarakat atau lembaga private yang menyelenggarakan pelayanan, serta badan usaha atau badan hukum yang bekerjasama dan diberi tugas melaksanakan fungsi pelayanan publik.

## **2.11 Pengertian E- Government**

Menurut World Bank, *e-government* mendefinisikan adalah penggunaan teknologi informasi seperti (*wide area network, internet* dan *mobile computing*) oleh pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, *e-government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyedia pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Menurut Zainal Abidin dalam Azari (2016: 79) mendefinisikan *e-government* dimaknai dengan suatu sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat yang berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi publik dan memberi akses layanan publik oleh instansi pemerintah.

Menurut Kasiyanto (2012:62) mendefinisikan *e-gomernment* merupakan untuk memenuhi tuntutan transparasi serta pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan tidak berbelit menuju *good government* (pemerintahan yang bersih), pemerintah mengeluarkan INPRES Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan strategi nasional pengembangan *e-government*. INPRES tersebut antara lain mengintruksikan kepada gubernur dan bupati/walikota diseluruh indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya program pengembangan *e-government* secara nasional.

## **2.12 Tujuan E-Government**

*E-government* adalah bentuk pemanfaat teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakatnya dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan tepat. selain itu dengan adanya *e-government* pemerintah juga bisa memudahkan urusannya dalam proses pemerintahan yang demokratis. Banyak manfaat yang didapatkan dari adanya *e-government* salah satunya untuk meningkatkan efisien internal, dan peningkatan efisiensi kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik secara manual.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*, dimana dalam hal ini *e-government* diarahkan untuk mencapai empat tujuan yaitu :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat secara luas serta dapat terjangkau diseluruh wilayah pada setiap saat, tanpa dibatasi waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan mempercepat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonomi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *e-government* sendiri adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mendukung terciptanya tata kelola pelayanan publik yang baik.

### 2.13 Pengertian Smart City

Menurut Nijkam, dkk mendefinisikan *Smart City* atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan kota yang mampu menggunakan SDM (Sumber daya manusia), modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi *modern* (*information and communication technology*) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

Konsep *Smart City* adalah konsep dengan sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. *Smart City* juga merupakan sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung. Dalam konsep *Smart City* kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya. *Smart City* dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur *social*, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota dengan membuat kota lebih efisien dan layak huni.

Secara sederhana disimpulkan bahwa *Smart City* merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan wilayah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

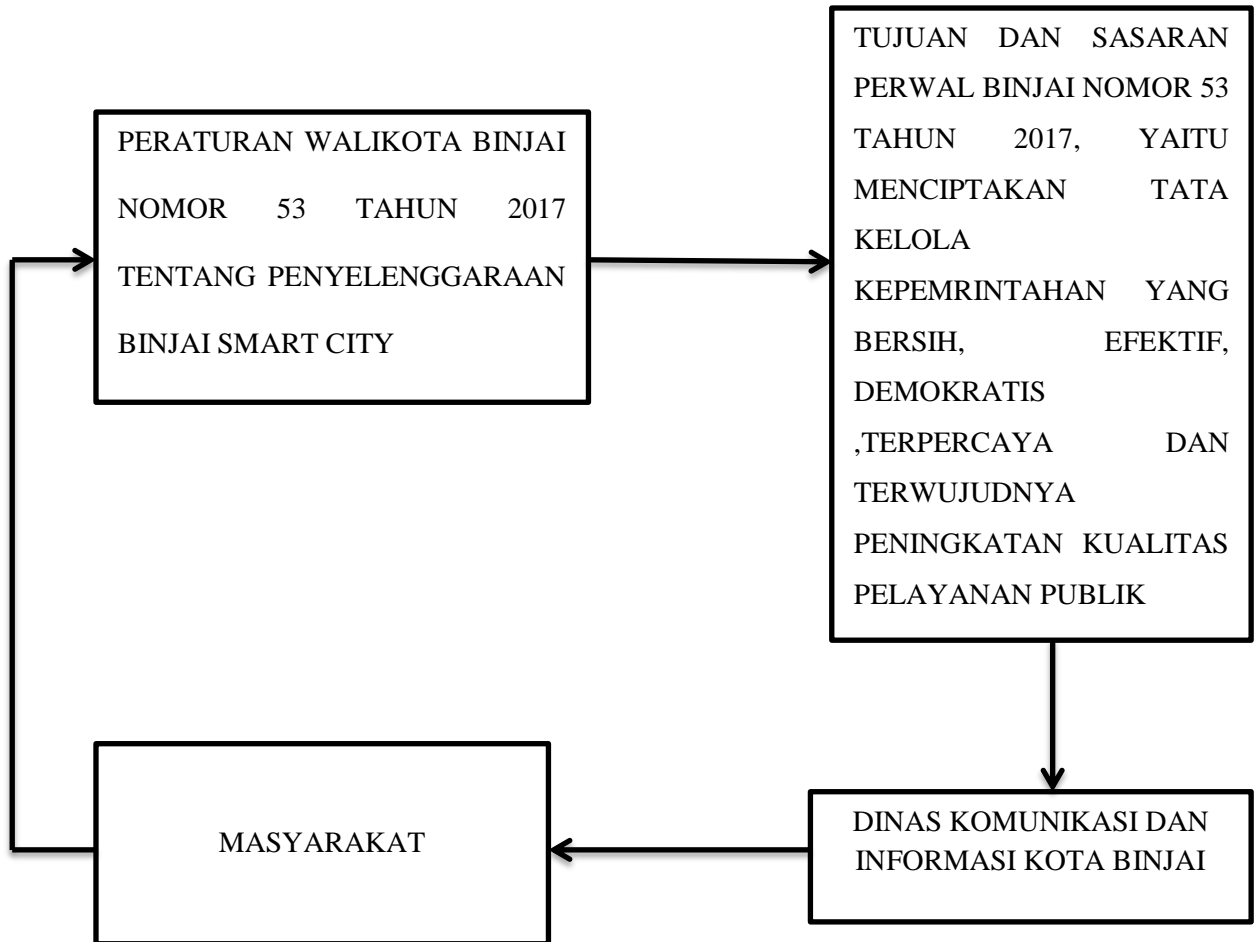
Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat di gambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang di bawah ini.

## KERANGKA KONSEP



### 3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu.

Bekaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Implementasi adalah suatu implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
2. Kebijakan kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dialakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan deangan adanya masalah ataupun persoalan tertentu yang dihadapi.
3. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.
4. Implementasi Kebijakan Publik implementasi kebijakan publik tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.
5. Penyelenggaraan meerupakan proses, cara, perbuatan dalam berbagai arti seperti pelaksanaan dan penunaian.
6. Smart City berarti kota pintar, merupakan kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi *modern*.



### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tujuan dan sasara yang ingin dicapai dalam peimplementasian
- b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
- c. Adanya program yang dilaksanakan dalam implementasi
- d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera berkeadilan

### **3.5 Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Tiga orang dari Dinas Komunikasi Dan Iformatika :
  - a. Pelda Sekretariat : M. Affan  
Umur : 40 Tahun
  - b. Seksi Aplikasi Dan Data Base : Ahmad Rizal  
Umur : 38 Tahun

c. Seksi Sarana Dan Prasarana : Danu Hendrawan  
Umur : 38 Tahun

2. Tiga orang dari pihak masyarakat Binjai :

a. Aparatur Sipil Negara : Linda Wati  
Umur : 36 Tahun

b. Wiraswasta : Aulia fitria Suchi  
Umur : 21 Tahun

c. Mahasiswa : Randi Permana  
Umur : 22 Tahun

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

a. Data Primer

Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian.

b. Data Skunder

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti yang mempelajari berbagai literature, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang di teliti.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Setelah data yang terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan.

### **3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di dinas komunikasi dan informasi kota binjai yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.6 Tangsi, Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara 20741 dan waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari sampai Maret 2019.

#### **3.8.1 Kondisi Geografis Kota Binjai**

Kota Binjai terletak di antara  $03^{\circ}03'40''$  -  $03^{\circ}40'02''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}27'03''$  -  $98^{\circ}39'32''$  Bujur Timur. Posisi Kota Binjai ada di bagian Utara Propinsi Sumatera Utara pada ketinggian tempat 25-35 m di atas permukaan laut dan kondisi wilayah relatif datar. Luas wilayah Kota Binjai adalah 9.023,62 Ha ( 90,23 km<sup>2</sup>) secara administratif terdiri dari 5 Kecamatan dan 37 Kelurahan dengan jumlah penduduk 219.145 jiwa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, wilayah Kota

Binjai berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara dengan Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang
- b. Sebelah selatan dengan Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
- d. Sebelah barat dengan Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat

Temperatur udara rata – rata satu tahun adalah 23,30 – 23,40 C dengan kelembaban antara 81 CH dan 83 CH dan curah hujan sebesar 2.195 mm/tahun. Dengan semangat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kesempatan kepada pemerintahan Kabupaten dan Kota untuk dapat meningkatkan kinerjanya secara kreatif, berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi umum Kota Binjai terdapat beberapa hal yang dinilai strategis dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pembangunan kota di berbagai bidang meliputi :

a. Hidrologi

Di tengah Kota Binjai, mengalir tiga buah sungai yaitu Sungai Bingei, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan mengalir dari arah selatan menuju utara. Sungai Bangkatan menyatu dengan Sungai Mencirim di Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota, sedangkan Sungai Bingei dan Sungai Mencirim memiliki potensi yang besar dalam menghasilkan galian Air Sungai Bingei dipakai sebagai bahan baku air PDAM Tirtasari.

b. Kondisi Land Use Kota Binjai

Pola tata guna tanah dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan, dalam hal ini penggunaan untuk pemukiman terus mengalami perubahan. Dalam hal ini, penggunaan untuk pemukiman terus bertambah sedangkan lahan sawah dan perkebunan cenderung semakin berkurang.

c. Posisi regional dalam pembangunan

Kota Binjai berada pada lintasan Jalan Negara antara Banda Aceh dengan Kota Medan dan daerah Wisata Bukit Lawang yang berada pada wilayah Pembangunan Medan Metropolitan Area yang dikelilingi oleh perkebunan rakyat.

d. Potensi masyarakat

Tingkat urbanisasi penduduk dari daerah lain ke Kota Binjai yang membuat masyarakat yang heterogen merupakan potensi pembangunan dari sumber konflik. Bentuk dan struktur heterogenitas masyarakat Kota Binjai terdiri dari suku yang termasuk : Batak, Melayu, Minang, Aceh, Jawa, Cina, dan lain lain.

### **3.8.2 Visi dan Misi Kota Binjai**

Visi : Mengacu pada batasan tersebut, serta RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah) Kota Binjai Tahun 2011-2015. Visi Pembangunan Daerah Kota Binjai dijabarkan sebagai berikut :

**“Terwujudnya Binjai Sebagai Kota Idaman yang Dinamis, Berdaya Saing, dan Nyaman dalam Kebersamaan “**

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan RPJM (Rencana pembangunan jangka menengah), maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut sebagai berikut :

- a. Idaman artinya Kota Binjai memiliki trademark/image sesuai dengan perkembangan kota dengan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Dinamis artinya Kota Binjai mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
- c. Berdaya Saing artinya Kota Binjai memiliki daya saing ( Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Industri, Jasa)
- d. Nyaman artinya Kota Binjai sebagai Kota Binjai sebagai kota yang nyaman bagi semua stakeholder untuk melaksanakan aktivitas kehidupan (bertempat tinggal, bekerja, dan beribadah).

e. Kebersamaan artinya menghidupkan suasana kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dengan semangat “Binjai Kotaku, Kotamu, dan Kota Kita Semua”.

**Adapun Misi Kota Binjai yaitu :**

- a. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang perekonomian.
- b. Membangun masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya.
- c. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- d. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Membangun dan membina kerukunan hidup beragama.
- f. Meningkatkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

**3.8.3 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai**

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

Adapun tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan program Binjai *Smart City* adalah :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery* dan TIK (Teknologi informasi dan komunikasi), internet pengguna akses internet, keamanan informasi *e-government*.
- b. Melakukan pelaksanaan bahan perumusan layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery* dan TIK (Teknologi informasi dan komunikasi), internet pengguna akses internet, keamanan informasi *e-government*.
- c. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery* dan TIK (Teknologi informasi dan komunikasi), internet pengguna akses internet, keamanan informasi *e-*



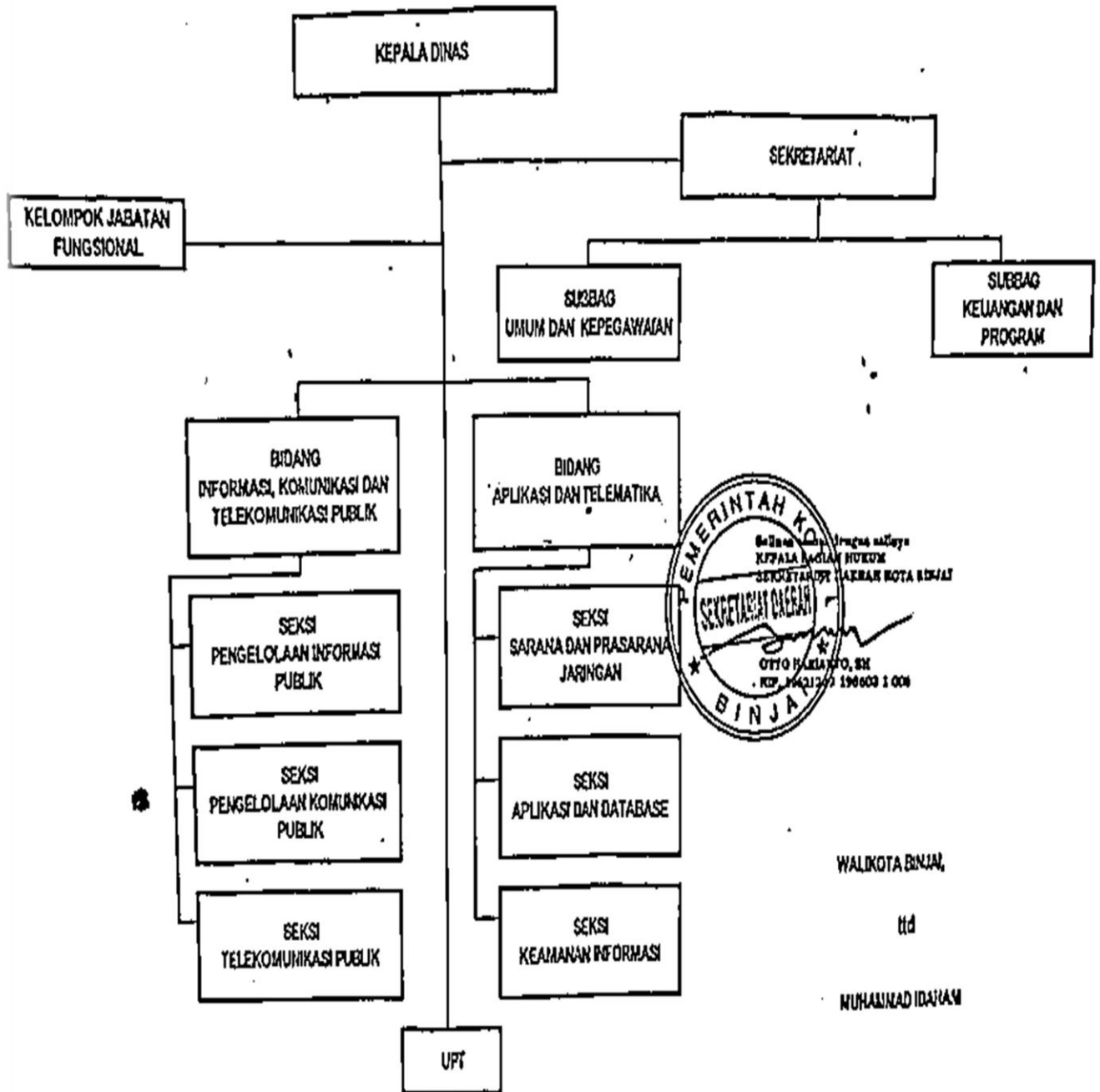
*government.*

- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksana kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, interaksi pelayanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK (Teknologi informasi dan komunikasi) *Smart City* didaerah.

### 3.8.4 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

KA - TIPE C

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
 NOMOR : 25 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 18 NOPEMBER 2016



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 HASIL PENELITIAN**

##### **4.1.1 Penyajian Data**

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai. Sumber data dalam penelitian ini adalah 3 orang dari pihak Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai dan 3 orang dari masyarakat Kota Binjai yang menggunakan fasilitas Binjai *Smart City*.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data skunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

##### **4.1.2 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Walikota Binjai nomer 53 tahun

2017 tentang penyelenggaraan Binjai *Smart City* dikota Binjai. Penyelenggaraan Binjai *Smart City* akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan- penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### **4.1.3 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

Narasumber dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu narasumber berjenis kelamin laki-laki dan narasumber berjenis kelamin perempuan sebagai berikut :

**TABEL 4.1**

#### **DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT JENIS KELAMIN**

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
<b>1</b>	Laki-laki	4	66.67 %
<b>2</b>	Perempuan	2	33.33 %
	Jumlah	6	100 %

**Sumber : Data Wawancara 2019**

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 66.67 %, sedangkan jenis kelamin perempuan frekuensi 2 orang atau 33.33 %.

#### 4.1.4 Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20-29 tahun, umur 30-39 tahun, dan umur 40-49 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategorisasi sebagai berikut :

**TABEL 4.2**

#### **DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT UMUR**

<b>No</b>	<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
1	20-29 Tahun	2	33.33 %
2	30-39 Tahun	3	50 %
3	40-49 Tahun	1	16.67 %
	Jumlah	6	100 %

**Sumber : Data Wawancara 2019**

#### 4.1.5 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu aparatur sipil negara, pegawai honorer, wiraswasta dan mahasiswa. Pada tabel 4.3 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

**TABEL 4.3**

**Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Aparatur Sipil Negara	4	66.67%
2	Wiraswasta	1	16.67%
3	Mahasiswa	1	16.67%
	Jumlah	6	100 %

**Sumber : Data Wawancara 2019**

## **4.2 PEMBAHASAN**

### **4.2.1 Program Binjai Smart City**

Konsep *Smart City* adalah sebagai sebuah kota yang dapat menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh warga yang tinggal tetap atau pendatang yang tinggal sementara di kota tersebut untuk berbagai keperluan. Informasi Kota ini didesain dengan mengimplementasikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh, dan digunakan untuk berbagai pelayanan yang dapat diberikan oleh sebuah sistem kota. Dengan penggunaan TIK (Teknologi informasi dan komunikasi) juga mendorong transparansi publik pada sistem tata kelola pemerintah dan perencanaan yang melibatkan warga kota sebagai salah satu *stakeholder*. Konsep *Smart City* dibangun dan dikembangkan dalam enam dimensi, yang meliputi, dimensi ekonomi (*smart economy*), manusia (*smart people*), tata kelola (*smart governance*), mobilitas (*smart mobility*), lingkungan (*smart environment*), dan kehidupan (*smart living*).

Kota Binjai adalah satu-satunya kota yang telah menerapkan konsep *Smart City* di Sumatera Utara. Pengembangan konsep Binjai *Smart City* merupakan konsep pengembangan Kota Binjai yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh warga yang tinggal tetap atau pendatang yang tinggal sementara di Kota Binjai untuk berbagai keperluan dengan menggunakan berbagai media teknologi. Pengembangan *e-government* adalah salah satu komponen pendukung untuk terwujudnya *Smart City* yang merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 sebagai landasan bagi seluruh kebijakan di bidang *e-government*. Pengembangan *e-government* akan melibatkan berbagai faktor yang memiliki andil dalam penciptaan suatu jasa layanan publik. Seluruh faktor tersebut perlu dirancang dari awal melalui suatu proses perencanaan yang matang agar dihasilkan program pengembangan *e-government* yang dapat diterapkan mulai dari faktor kepemimpinan, sumber daya manusia, organisasi, dan sistem manajemen, sarana komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak, anggaran, dan lain-lain yang harus dipadukan dengan sebuah perencanaan yang terpadu, holistik, bertahap, realistis, dan terukur.

Dengan mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Pemerintah Kota Binjai mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dan kemudian menyusun rencana induk pengembangan *Smart City* Kota Binjai 2016-2021. Di

bawah kepemimpinan Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu H. Muhammad Idaham dan Timbas Tarigan, dan membuat Visi Pembangunan Kota Binjai Tahun 2016-2021 “ Terwujudnya Kota Cerdas yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai yang Sejahtera,” serta dengan misi pembangunan Kota Binjai Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*smart governance*) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintah kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas (*smart people*) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera.
3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*smart mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui peningkatan sumber daya alam berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil, kreatif, inovatif, dan produktif (*smart economy* dan *smart environment*)
5. Meningkatkan kualitas standar hidup (*smart living*) dalam aspek kelayakan kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Dengan adanya visi dan misi dari Pemerintah Kota Binjai untuk mendukung berjalanya tujuan Kota Binjai, Pemerintah Kota Binjai mengeluarkan peraturan walikota nomer 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan *Smart City* untuk



mendukung dan sebagai pedoman peraturan dari Program Binjai *Smart City*.

Dalam rangka pembangunan dan pengembangan Binjai *Smart City*, Pemerintah Kota Binjai membuat beberapa program-program dengan salah satu strateginya adalah membangun aplikasi-aplikasi yang telah diidentifikasi sesuai dengan *Blueprint* sistem aplikasi *e-government* untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dunia bisnis dan lingkungan pemerintahan seperti pada dimensi manusia (*smart people*) yang menjadi salah satu misi Pembangunan Kota Binjai 2016-2021 yaitu :

1. Peningkatan tata kelola yaitu transparansi, informatif, dan responsive melalui penerapan *e-government* pada setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah).
2. Peningkatan partisipasi masyarakat pada pembangunan dan perubahan sikap dan budaya yang lebih baik melalui penerapan aplikasi layanan dan pengaduan masyarakat.
3. Peningkatan kemudahan dan kenyamanan akses layanan umum (transportasi, wisata, dan publik servis) baik bagi warga ataupun pengunjung kota Binjai melalui penerapan aplikasi informasi kota.
4. Peningkatan perekonomian kota dengan pertumbuhan digital *entrepreneurship* dan peningkatan kunjungan dan transit dengan pengupayaan penerapan aplikasi-aplikasi informasi usaha dan jasa yang informatif dan kemudahan dalam mengakses.

Pembangunan sistem aplikasi pada dimensi *smart people* dan *smart governance* salah satunya difokuskan pada pelayanan untuk masyarakat. Aplikasi yang dibuat adalah salah satu program Pemerintah Kota Binjai dalam pengembangan *Smart City* di Kota Binjai dengan tujuan, pemberi maupun penerima pelayanan pemerintah dapat menjadi sumber daya manusia yang cerdas.

Dalam sebuah program Binjai *Smart City*, implementasi kebijakan menggunakan konsep *e-government* untuk melaksanakannya. Dengan konsep *e-government*, berarti sebuah Pemerintah harus mampu mengembangkan, mengelola sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi. Kota Binjai adalah kota yang memiliki visi dengan menjadikan Kotanya sebagai Kota yang *Smart City* yang selanjutnya pemerintah Kota Binjai membuat Peraturan Walikota Binjai Tahun 2017 Nomor 53 tentang Penyelenggaraan *Smart City*,

yang salah satu ruang lingkupnya adalah *smart people* dan *smart governance*.

#### **4.3 Deskripsi Hasil Wawancara**

##### **a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam peimplementasian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam Peraturan Walikota Binjai nomer 53 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Binjai *Smart City* dikota Binjai adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya, dan mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 18 Februari 2019 dengan Bapak M. Affan sebagai Pelda Seketarian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, menyatakan bahwa penyelenggaraan Binjai *Smart City* adalah program dari Pemerintah Binjai yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab tersebut efisien dan efektif, maka organisasi Pemerintah Daerah harus dapat berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*. Pemerintah daerah harus lebih berusaha sendiri dengan kaidah-kaidah yang ada, dengan adanya Survei Kondisi *Eksisting* dari Perangkat *Software* dibidang teknologi informasi serta analisisnya direncanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berhubungan dalam penyusunan berbagai kebijakan dibidang teknologi informasi khususnya dilingkup pemerintahan daerah khususnya dalam menunjang pelaksanaan dan pengimplementasian *e-government* dan *Smart City*.

Selain itu, hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Danu Hendrawan sebagai Plt (Pelaksana teknis) Kasi Sarana dan Prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Binjai pada hari Senin, 18 Februari 2019 menyatakan bahwa dalam penyelenggraan Binjai *Smart City*, Point dari sasaran program Binjai *Smart City* adalah terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat dan membangun partisipasi masyarakat untuk pembangunan. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan percepatan pengembangan Binjai *Smart City* serta analisa pemanfaatan konsep *Smart City* pada layanan Pemerintahan Kota Binjai yang lebih dikenal dengan *e-government* atau *digital government*. Untuk kendala pada penyelenggaraan program Binjai *Smart City* yang paling sering terjadi adalah kesalahan teknis pada jaringan penyebabnya dapat dari faktor alam atau cuaca dan faktor manusia.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 18 Februari 2019 dari Bapak Ahmad Rizal selaku Kasi Aplikasi Dan Data Base Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, menyatakan bahwa infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Infrastruktur merupakan roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi juga sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, seperti dalam peningkatan nilai konsumsi, produktivitas, tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja. Program Binjai *Smart City* dalam hal ini berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat Binjai yaitu melalui program-program yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Konsep dari Kota Cerdas yang membantu masyarakatnya dengan mengelola sumberdaya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau mengantisipasi kejadian yang tidak terduga.

**b. Adanya Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan**

Terbangunya program aplikasi Binjai *Smart City* untuk menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan strategis dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi khususnya untuk mendukung *e-government* dan *Smart City* yang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi. Hal tersebut tidak lepas dari penyelenggara program dan pihak-pihak yang terkait dalam program Binjai *Smart City* di Kota Binjai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danu Hendrawan sebagai Plt. Kasi Sarana Dan Prasarana di Dinas komunikasi dan informatika Kota Binjai pada hari Senin, 18 Februari 2019 menyatakan bahwa adanya Pelaksana Yang Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Binjai nomer 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Binjai *Smart City* terkait hal itu Pemerintah Kota Binjai yaitu Walikota, Sekretaris Daerah, OPD (Ogranisasi perangkat daerah) dan berbagai Dinas- dinas terkait dalam pelaksanaan Binjai *Smart City* saling bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Binjai *Smart City*, Pemerintah Kota Binjai juga bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu dari Politeknik Negeri Medan sebagai institusi pendidikan, PT. Telkom dan PLN dari dunia industri, dan dalam hal ini kepala daerah yaitu Walikota Binjai memantau jalanya program Binjai *Smart City*.

Selain itu, menurut Bapak M. Affan sebagai Pelda Seketarian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai menyatakan bahwa penyelenggaraan Binjai *Smart City* adalah program dari Pemerintah Binjai bekerjasama dengan OPD yaitu Dinas komunikasi dan informatika Kota Binjai, peran dari Dinas ini

adalah membuat prasarana atau aplikasi- aplikasi dari program Binjai *Smart City*, mengembangkan aplikasi yang telah ada dan membangun aplikasi baru yang dianggap perlu dikembangkan berdasarkan persetujuan Walikota, Sekretaris Daerah dan OPD terkait, Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai mediator terhadap penyaluran atau jalanya informasi dari masyarakat kepada pihak penanggung jawab laporan atau pengaduan masyarakat, Dinas Komunikasi Dan Informatika juga membantu sosialisasi aplikasi yang dilaksanakan oleh OPD (Organisasi perangkat daerah) terkait aplikasi-aplikasi yang akan disosialisasikan dan membantu fungsi- fungsi TIK (Teknologi informasi dan komunikasi) dalam hal memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Kota Binjai.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 18 Februari 2019 dari Bapak Ahmad Rizal selaku Kasi Aplikasi Dan Data Base Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan Binjai *Smart City* tidak dipungkiri terdapat kendala-kendala dalam pengimplementasiannya untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dan pemerintah Kota Binjai dalam hal ini PPTK (Pejabat pelaksana teknis kegiatan) memiliki strategi untuk menghadapi hambatan atau kendala agar Binjai *Smart City* berjalan sesuai dengan prosedur yang dimuat yaitu dengan koordianasi dengan pihak pelaksana Binjai *Smart City*, bahwa dalam rangkaian organisasi itu terdapat suatu hubungan erat antara atasan atau pimpinan dan bawahan, sehingga akan terjalinlah sebuah program kerja yang efektif, dan hal itu tidak luput dari adanya suatu pengorganisaan dari sang pemimpin organisasi, selain itu *monitoring* yang merupakan bagian integral dari perencanaan yang sudah disusun, dengan

*Monitoring* dapat memahami perencanaan program baik pendekatan maupun hasil perencanaan, dalam hal ini secara umum menggunakan pendekatan berbasis masalah yaitu suatu pendekatan yang diawali dengan mengidentifikasi masalah-masalah sebagai dasar dalam penyusunan program. Hal penting yang diperlukan dalam perencanaan program adalah bagaimana perencanaan program berhasil merumuskan perubahan yang dihendaki secara logis dan rasional dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika akan memudahkan organisasi membaca kemajuan dan efek program yang dijalankan dari tahun ke tahun.

**c. Adanya Program Yang Dilaksanakan Dalam Implementasi**

Program yang dilaksanakan adalah terbangunnya aplikasi yang menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan strategis dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi khususnya untuk mendukung *e-government* dan *Smart City* yang bersifat menyeluruh, terpadu serta koordinasi yang secara dinamis dan realistis memperhitungkan serta mengaitkan aspek-aspek manajemen kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumberdaya manusia, jaringan komunikasi data dan aspek penting lainnya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh pada hari Senin, 18 Februari 2019 dari Bapak Ahmad Rizal selaku Kasi Aplikasi Dan Data Base Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, menyatakan bahwa aplikasi- aplikasi yang dibangun mendukung penentuan arah kebijakan dan strategi yang dapat menjadi pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan terkait dengan

pengembangan teknologi informasi khususnya untuk mendukung *e-government* dan *Smart City*. Adapun jenis aplikasi atau pelayanan digital dalam program Binjai *Smart City* pada tabel 4.4 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Jenis Aplikasi 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA APLIKASI</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>SIFAT</b>
1	eRA	G2G	Dikembangkan
2	eMusrenbang 2019	G2G, G2C	Dikembangkan
3	PPDB 2018	G2C	Dikembangkan
4	JDIH	G2G, G2C	Baru
5	PMKS	G2G	Baru
6	EUMKM	G2B	Baru
7	EOFFICE	G2G	Baru
8	ESDM	G2E	Baru
9	ETKD	G2E	Baru
10	EABSENSI	G2E	Baru
11	ETOURISM	G2B	Baru
12	KPU	G2G	Baru
13	TRANSBINJAI WEB	G2C	Dikembangkan
14	INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN	G2G, G2C	Baru
15	INTEGRASI DATA KEPEGAWAIAN	G2G, G2E	Baru

**Sumber : Data Wawancara 2019**



Sedangkan pada tahun 2017 peluncuran terbaru dari aplikasi hanya terdapat lima aplikasi pada program Binjai *Smart City*, yaitu pada tabel 4.5 :

**Tabel 4.5**  
**Jenis Aplikasi 2017**

No	NAMA APLIKASI	SIFAT
1	ERA	Baru
2	EMASYARAKAT	Baru
3	EDOKTER	Baru
4	EPERIZINAN	Baru
5	EMUSRENBANG	Baru

**Sumber : Data Wawancara 2019**

Pada aplikasi- aplikasi tersebut pada tahun 2018, ada aplikasi yang bersifat dikembangkan, dan bersifat baru. Terdapat empat aplikasi yang bersifat dikembangkan dan sebelas aplikasi yang bersifat baru. Pada 2017 peluncuran aplikasinya terbarunya terdapat lima yang bersifat baru. Pengembangan aplikasi yang telah ada dan membangun aplikasi baru yang dianggap perlu dikembangkan berdasarkan persetujuan Walikota, Sekretaris daerah dan OPD (Organisasi perangkat daerah) terkait. Aplikasi tersebut juga membantu fungsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam hal memberikan masukan- masukan kepada Pemerintah Binjai.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak M. Affan sebagai Pelda Seketarian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai pada

hari Senin, 18 Februari 2019, menyatakan bahwa adanya program yang dilaksanakan dalam implementasi Binjai *Smart City*, tidak lepas dari tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki strategi untuk mendukung dan menjalankan program Binjai *Smart City* agar mencapai tujuan dan sasaran yaitu dengan koordinasi dengan pemerintah Kota Binjai, OPD (Organisasi perangkat daerah), dan Dinas- dinas terkait dalam penyelenggaraan Binjai *Smart City*, sehubungan dengan koordinasi dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan kolaborasi dengan OPD (Organisasi perangkat daerah), dan Dinas- dinas yang ada di kota Binjai agar dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengetahui permasalahan-permasalahan terkait laporan dari masyarakat dan juga mengetahui pelayanan yang bagaimana yang harus diberikan kepada masyarakat, karena Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai media atau pelantara dari program Binjai *Smart City*.

Hasil wawancara pada hari Senin, 18 Februari 2019 yang diperoleh dari Bapak Danu Hendrawan sebagai Plt. Kasi Sarana Dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, menyatakan bahwa program yang ada dalam Binjai *Smart City* tidak terlepas dari sarana yang digunakan untuk menjalankan Program Binjai *Smart City* ini, adapun sarana yang dapat menunjang berjalanya program adalah aplikasi- aplikasi dari segi *tools* seperti E-Dokter, E-Masyarakat, E-Perizinan, E-RA, E-Musrenbang 2019, PPDB 2018, JDIH, PMKS, EUMKM, EOFFICE, ESDM, ETKD, EABSENSI, ETOURISM, KPU, Trans Binjai Web, Integrasi Data Kependudukan, dan Integrasi Data

Kepegawaian, tidak hanya aplikasi atau *tools* tersebut dalam Program Binjai *Smart City* terdapat Trans Binjai sebagai salahsatu fasilitas transportasi untuk masyarakat.

Selain itu, hasil wawancara yang diperoleh oleh Bapak M. Affan sebagai Pelda Seketarian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, pada hari Senin, 18 Februari 2019 menyatakan bahwa terdapat enam pilar dari berjalanya Binjai *Smart City* ini yaitu, pemerintah yang cerdas (*smart governance*), sumber daya manusia yang berkualitas (*smart people*), mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (*smart mobility*), perekonomian kota (*smart economy*), pengembangan sumber daya manusia (*smart environmen*), dan meningkatkan kualitas standar hidup (*smart living*). Dari kenam pilar tersebut menjadi target dari Pemerintah Kota Binjai untuk mewujudkan Kota yang cerdas, dimulai dari Pemerintah yang cerdas dan transparan untuk dapat mengedukasi masyarakat supaya dapat terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berkualitas dan dapat mengangkat perekonomian di Kota dengan hal itu dapat dengan mudah untuk meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat di Kota Binjai.

Dalam hal tersebut, Pada hari Senin, 18 Februari 2019 mengatakan Bapak M. Affan mengatakan program Binjai *Smart City* sedang proses membangun, sudah 3 tahun berjalan dan sejauh ini respon dari masyarakat sudah bagus dan banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam penggunaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Binjai. Terkait program Binjai *Smart City* pada penggunaan layanan aplikasi- aplikasi dan penggunaan transportasi yang disediakan secara gratis kepada masyarakat. Salin itu, banyak juga dari Kabupaten dan Kota, atau

tamu yang datang berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai untuk penelitian, belajar atau *study* banding tentang membangun Binjai *Smart City* untuk diterapkan di daerahnya masing-masing. Kabupaten dan Kota yang belajar atau *study* banding seperti berasal dari Sulawesi Selatan, Tebingtinggi, Labuhan Batu, Pematangsiantar, Bukit Tinggi, dan Kabupaten Kota yang lainnya. Melihat hal ini respon dan antusias dari masyarakat baik dari dalam dan luar daerah sudah bagus dan baik.

**d. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera dan Berkeadilan**

Teknologi dapat mempermudah pekerjaan manusia agar lebih efektif, efisien, dan tentunya membawa manfaat bagi sipenggunanya. seperti, teknologi komunikasi yang terus berkembang, pada program Binjai *Smart City* ini aplikasi-aplikasi dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Binjai manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kota Binjai.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Randi Permana sebagai Masyarakat Kota Binjai , pada hari Senin, 18 Februari 2019 mengatakan bahwa manfaat yang dapat dirasakan dari Program Binjai *Smart City* ini oleh masyarakat yaitu, masyarakat dapat lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Binjai dan masyarakat dapat berinteraksi langsung dan mengkritik Pemerintah Kota Binjai apabila ada kendala yang dihadapi, dan hal itu dapat langsung dibaca dan direspon oleh Pemerintah Kota Binjai. Dengan adanya

metode transparansi ini masyarakat jadi lebih turut serta dan lebih mudah untuk berinteraksi dengan Pemerintah Kota Binjai.

Selain itu, Randi Permana mengatakan tingkat partisipasi dari masyarakat dalam menggunakan sarana dan fasilitas dari Binjai *Smart City* sudah banyak dan dinilai bagus, masyarakat sudah banyak mengetahui layanan aplikasi-aplikasi tersebut karena sudah banyak juga masyarakat yang menggunakan *smartphone* untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka.

Dalam hal pada pada hari Senin, 18 Februari 2019 Ibu Linda Wati sebagai Masyarakat di Kota Binjai, mengatakan adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sejauh ini belum berpengaruh terhadap produktifitas perekonomian Kota Binjai, hal ini dinilai terasa wajar karena Program Binjai *Smart City* ini baru berjalan 3 tahun dan efeknya sangat kecil dirasakan oleh masyarakat yang berwirausaha, karena tolak ukur penting dalam penentuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat Kota Binjai. Berkaitan dengan hal itu, indikator dari masyarakat yang sejahtera, menurut Ibu Linda adalah dalam hal kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada pada hari Senin, 18 Februari 2019 Aulia Fitria suchi sebagai Masyarakat Binjai mengatakan Program Binjai *Smart City* dirasa sudah banyak

dirasakan manfaatnya selain praktis, yaitu masyarakat tidak perlu datang pada tempat pelayanan pengaduan atau mencari informasi di tempat tersebut, tetapi bisa langsung mengetahui informasi dan mengurus masalah melalui aplikasi yang dapat diakses pada *smartphone* dan *website* Pemerintah Kota Binjai, hal ini dapat mempermudah urusan masyarakat.

## **b. Analisis Hasil Wawancara**

### **1. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pengimplementasian**

Tujuan yang ingin dicapai merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumberdaya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Dalam hal penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan peraturan Walikota Binjai yang telah diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan peraturan Walikota Binjai nomer 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Binjai *Smart City* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai sudah diimplementasikan dan digunakan sebagai acuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dan mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan. Strategi yang telah dilakukan dalam hal menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dan mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan adalah untuk dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab tersebut efisien dan efektif, maka organisasi pemerintah daerah harus dapat berlandaskan

prinsip-prinsip *good governance*. Pemerintah daerah harus lebih berusaha sendiri dengan kaidah-kaidah yang ada. Dengan adanya Survei Kondisi *Eksisting* dari Perangkat *Software* dibidang teknologi informasi serta analisisnya direncanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berhubungan dalam penyusunan berbagai kebijakan dibidang teknologi informasi khususnya dilingkup pemerintahan daerah khususnya, dalam menunjang pelaksanaan dan pengimplementasian *e-government* dan *Smart City* dan dilakukan kegiatan percepatan pengembangan Binjai *Smart City* , serta analisa pemanfaatan konsep *Smart City* pada layanan Pemerintahan Kota Binjai yang lebih dikenal dengan *e-government* atau *digital government*. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam pengimplementasian penyelenggaraan Binjai *Smart City* tersebut masih terdapat kendala, pada penyelengraan program Binjai *Smart City* yang paling sering terjadi adalah kesalahan teknis pada jaringan, penyebabnya dapat dari faktor alam atau cuaca dan faktor manusia yang dapat mengambat jalanya program untuk memberikan pelayanan dan iformasi kepada masyarakat Binjai.

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pengimplementasian penyelenggaraan Binjai *Smart City* yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, peraturan Walikota Binjai yang diterapkan di Kota Binjai untuk diimplementasikan dan digunakan sebagai acuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dan mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan. Stategi pelaksanaan dan pengimplementasian *e-government* dan *Smart City* dan dilakukan kegiatan

percepatan pengembangan Binjai *Smart City* serta analisis pemanfaatan konsep *Smart City* pada layanan. Pemerintahan Kota Binjai yang lebih dikenal dengan *e-government* atau *digital government*, menggunakan Survei Kondisi *Eksisting* dari Perangkat *Software* dibidang teknologi informasi serta analisisnya direncanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berhubungan dalam penyusunan berbagai kebijakan dibidang teknologi informasi khususnya dilingkup pemerintahan daerah khususnya dalam menunjang pelaksanaan dan pengimplementasian *e-government* dan *Smart City*.

## **2. Adanya Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan**

Pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Binjai *Smart City* untuk menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan strategis dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi khususnya untuk mendukung *e-government* dan *Smart City* yang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi.

Adapun pihak yang bertanggung jawab terhadap berjalanya Pelaksanaan peraturan Walikota Binjai nomer 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Binjai *Smart City* terkait hal itu Pemerintah Kota Binjai yaitu Walikota, Sekretaris Daerah, OPD (Organisasi perangkat daerah), dan berbagai Dinas- dinas terkait dalam pelaksanaan Binjai *Smart City* saling bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Binjai *Smart City*, Pemerintah Kota Binjai juga bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu dari Politeknik Negeri Medan sebagai institusi pendidikan, PT. Telkom dan PLN dari dunia industri, dan dalam hal ini kepala daerah yaitu Walikota Binjai memantau jalanya program Binjai *Smart City*.



### 3. Adanya Program Yang Dilaksanakan Dalam Implementasi

Program yang dilaksanakan adalah suatu rencana yang sudah mempunyai tujuan dan sasaran kedepannya dari komitmen semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Binjai *Smart City*. Penerapan program yang dilaksanakan susah sesuai dengan peraturan Walikota Binjai dan masih dalam pengembangan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Program Binjai *Smart City* adalah aplikasi- aplikasi terbaru yang diluncurkan yang dapat mempermudah masyarakat dalam mencari informasi dan melaporkan permasalahan dan juga dalam mengurus urusan masyarakat Kota Binjai, aplikasi terbaru yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jenis Aplikasi 2017**

No	NAMA APLIKASI	SIFAT
1	ERA	Baru
2	EMASYARAKAT	Baru
3	EDOKTER	Baru
4	EPERIZINAN	Baru
5	EMUSRENBANG	Baru

**Sumber : Data Wawancara 2019**

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2017 program Binjai *Smart City* berjumlah lima aplikasi yang bersifat baru. Adapun jenis aplikasi- aplikasi yang dirancang dalam kurun

waktu satu tahun pada tahun 2018 oleh pemerintah Kota Binjai Bersama Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu pada tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Jenis Aplikasi 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA APLIKASI</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>SIFAT</b>
1	eRA	G2G	Dikembangkan
2	eMusrenbang 2019	G2G, G2C	Dikembangkan
3	PPDB 2018	G2C	Dikembangkan
4	JDIH	G2G, G2C	Baru
5	PMKS	G2G	Baru
6	EUMKM	G2B	Baru
7	EOFFICE	G2G	Baru
8	ESDM	G2E	Baru
9	ETKD	G2E	Baru
10	EABSENSI	G2E	Baru
11	ETOURISM	G2B	Baru
12	KPU	G2G	Baru
13	TRANSBINJAI WEB	G2C	Dikembangkan
14	INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN	G2G, G2C	Baru
15	INTEGRASI DATA KEPEGAWAIAN	G2G, G2E	Baru

**Sumber : Data Wawancara 2019**

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang diluncurkan dan baru dikembangkan berjumlah 15 aplikasi yang sudah dapat diakses oleh masyarakat Kota Binjai pada tahun 2018.

Selain aplikasi- aplikasi atau berupa *tools*, pelayanan yang diberikan dalam program Binjai *Smart City* ini berupa transportasi gratis untuk masyarakat Kota Binjai yaitu adanya Trans Binjai untuk membantu masyarakat dalam mempermudah akses untuk mencapai tempat tujuan. Sejauh ini program Binjai *Smart City* sudah berjalan efektif karena respon dari masyarakat Kota Binjai sudah bagus, begitupun antusias dari Kabupaten dan Kota yang belajar tentang membangun *Smart City* kepada Pemerintah Kota Binjai di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Terkait dengan pembahasan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki strategi untuk mendukung dan menjalankan Program Binjai *Smart City* agar mencapai tujuan dan sasaran yaitu dengan koordinasi dengan Pemerintah Kota Binjai, OPD (Organisasi perangkat daerah) dan Dinas- dinas terkait dalam penyelenggaraan Binjai *Smart City*, sehubungan dengan koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan kolaborasi dengan OPD dan Dinas- dinas yang ada di kota Binjai, agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengetahui permasalahan-permasalahan terkait laporan dari masyarakat dan juga dapat memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat.

#### **4. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berkeadilan**

Setiap kebijakan yang diterapkan akan menimbulkan pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif, pengaruh positif dimaksudkan sebagai pengaruh yang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Begitupun juga dengan adanya program Binjai *Smart City* ini akan ada pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Walikota Binjai Nomer 53 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai *Smart City* Di Dinas Komunikasi dan Informatika sudah diimplementasikan dengan besarnya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, yaitu menunjuk ke jangkauan pelayanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Binjai. Sejauh ini pengaruh program Binjai *Smart City* dalam peningkatan produktifitas dan perekonomian kota belum berpengaruh dan belum efektif terhadap produktifitas perekonomian Kota Binjai, hal ini dinilai terasa wajar karena Program Binjai *Smart City* ini baru berjalan 3 tahun dan efeknya sangat kecil dirasakan oleh masyarakat yang berwirausaha.

Terkait pembahasan ini Program Binjai *Smart City* telah memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu, masyarakat dapat lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Binjai dan masyarakat dapat berinteraksi langsung dan mengkritik Pemerintah Kota Binjai apabila ada

kendala yang dihadapi, dan hal itu dapat langsung dibaca dan direspon oleh Pemerintah Kota Binjai.

Dari semua pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa program Binjai *Smart City* sudah berjalan dengan baik, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Binjai dalam kurun waktu 3 tahun pembangunan program tersebut, akan tetapi dampaknya masih kecil dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomian kota sesuai dengantujuan dan sarasan dari Peraturan Walikota Binjai nomer 53 tahun 2017 Tetang Penyelenggraan Binjai Smart City di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan Uraian- uraian diatas yang telah dikembangkan pada bab sebelumnya, serta analisis data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Peraturan Walikota Binjai nomer 53 tahun 2017 tentang Penyelenggraan Binjai *Smart City* dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran di Dinas Komunikasi dan Iformatika Kota Binjai belum terlaksana sepenuhnya dengan efektif, dikarenakan belum tercapainya tujuan dan sasaran dari program Binjai *Smart City* yaitu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dan mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

Adapun pelaksana yang bertanggung jawab terhadap penyelenggraan Binjai *Smart City* adalah Pemerintah Kota Binjai yaitu Walikota, Sekretaris Daerah, OPD (Ogranisasi perangkat daerah) dan berbagai Dinas- dinas. Pemerintah Kota Binjai juga bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu dari Politeknik Negeri Medan sebagai institusi pendidikan, PT. Telkom dan PLN dari dunia industri, dan dalam hal ini kepala daerah yaitu Walikota Binjai memantau jalanya program Binjai *Smart City*. Terkait dalam pelaksanaan Binjai *Smart City* saling bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Binjai *Smart City* Tujuan dan sasaran dari Program Binjai *Smart City* adalah dalam Peraturan Walikota Binjai nomer 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Binjai *Smart City* dikota Binjai adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya, dan mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

Pengembangan konsep Binjai *Smart City* merupakan konsep pengembangan Kota Binjai yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh warga yang tinggal tetap atau pendatang yang tinggal sementara di Kota Binjai untuk berbagai keperluan dengan menggunakan berbagai media teknologi. Pengembangan *e-government* adalah salah satu komponen pendukung untuk terwujudnya *Smart City* yang merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada penyelenggaraan program Binjai *Smart City* terdapat aplikasi-aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2017 dan 2018 yang dapat mempermudah masyarakat dalam mencari informasi dan melaporkan permasalahan dan juga dalam mengurus urusan masyarakat Kota Binjai, adapun aplikasi-aplikasi E-Ra, E-Masyarakat, E-Dokter, E-Perizinan, E-Musrenbang, dll, adalah program dari penyelenggaraan Binjai *Smart City* merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai untuk memudahkan birokrasi pemerintahan berbasis teknologi *online*, hal ini juga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah, instansi maupun lembaga yang diinginkan oleh masyarakat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran- saran dalam implementasi Peraturan Walikota Binjai nomer 53 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Binjai *Smart City* dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran di Dinas Komunikasi dan Iformatika Kota Binjai sebagai berikut :

1. Agar program Binjai *Smart City* mampu meningkatkan kualitas standar hidup masyarakat.
2. Agar program Binjai *Smart City* dapat lebih mengedepankan pelayanan yang baik terhadap masyarakat Kota Binjai
3. Agar Pemerintah Kota Binjai yaitu Walikota, Sekretaris Daerah, OPD (Ogranisasi perangkat daerah) dan berbagai Dinas- dinas terkait dalam pelaksanaan Binjai *Smart City* lebih meningkatkan tanggung jawab terhadap pelaksanaan Binjai *Smart City*.
4. Agar program Binjai *Smart City* terus berinovasi dan menambah sarana atau fasilitas yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
5. Agar program Binjai *Smart City* lebih disosialisasikan dengan luas kepada semua lapisan masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan merasakan manfaat yang dibuat oleh pemerintah Kota Binjai.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku- Buku

- Abidin, Zainal. 2016. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Fredrich, Jenkins dan E. Anderson, James. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gordon dkk..... 2016. *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Ghalia: Jakarta
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2017. *Sosiologi Perkotaan*. Bandung : Pustaka setia
- Kasiyanto, 2010. *Good Governance Kepemerintahan Yang Baik*. Bandung: Mandar Maju Pers
- Sugandi, Suprayogi Yogi. 2011. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Mifta. 2012. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- , 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana

### Internet

- Aminullah, “*Kebijakan Publik*”. Ataghaita. 2013. 28 Desember 2018.  
<<https://ataghaita.wordpress.com/2013/04/25/kebijakan-publik>>
- Dunn, William, “*Dinamika Kebijakan Publik*”. Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan William Dunn. 2011. 28 Desember 2018.  
<<http://dinamikakebijakanpublik.blogspot.com/2011/10/tahap-tahap-pembuatan-kebijakan-publik.htm>>
- Nijkam, “*Menuju Konsep Smart City*” Smart City. 2016. 28 Desember 2018.  
<[https://www.researchgate.net/publication\\_Menuju\\_Konsep\\_Smart\\_City](https://www.researchgate.net/publication_Menuju_Konsep_Smart_City)>

Pemerintah Kota Binjai. "*Binjai Smart City*" 2018. Kota Binjai. 28  
Desember 2018. <[www. http://binjaikota.go.id/home](http://binjaikota.go.id/home).>

### **Undang –Undang**

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City

Undang-undang Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas

Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai

### **Jurnal**

Yulvina, weliza. "*Implementasi Program Binjai Smart City Melalui  
Elektronik Dokter (e-Dokter) di Kota Binjai*". USU.Medan (Juli 2018):  
29-50

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Iga Cyntia Putri

Tempat/Tgl. Lahir : Pematangsiantar, 23 September 1997

Alamat : Jl. Viatayudha No. F2 Tojai Baru, Kota Pematangsiantar

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Bapak : Margana

Nama Ibu : Zulhaida

### Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri Kujang 1 Cicalengka Kab. Bandung  
Tahun 2003 – 2008
2. SMP Negeri 1 Kota Pematangsiantar  
Tahun 2009 – 2011
3. SMA Negeri 6 Kota Pematagsiantar  
Tahun 2012 – 2014

## **Pedoman wawancara**

### **Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai**

Nama :

Umur :

Jabatan :

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Adanya tujuan dan sasara yang ingin dicapai dalam peimplementasian**

1. Apa tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan binjai smart city?
2. Bagaimana strategi yang dibangun dalam pelaksanaan program binjai smart city?
3. Apa pengaruh kualitas kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya melalui pembangunan infrastruktur dalam program binjai smart city?
4. Apakah ada kendala dalam pengimplementasian program binjai smart city?

#### **b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan**

1. Pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggraan binjai smart city?
2. Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab dari dinas komunikasi dan informatika kota binjai?

3. Bagaimana cara yang diambil apabila ada kendala-kendala dalam pengimplementasian binjai smart city?
4. Apakah ada penilaian tugas dan fungsi dari kepala daerah?

**c. Adanya program yang dilaksanakan dalam implementasi**

1. Apa saja pelayanan digital yang ada dalam program binjai smart city?
2. Bagaimana strategi yang dibangun dalam program binjai smart city oleh dinas komunikasi dan informatika kota binjai?
3. Sarana apa saja yang dipakai dalam program binjai smart city?
4. Apakah program binjai smart city sudah efektif?

**d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera berkeadilan (Pertanyaan untuk masyarakat)**

1. Apakah indikator dari masyarakat yang sejahtera berkeadilan?
2. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat terhadap berlangsungnya program binjai smart city?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program binjai smart city?
4. Apakah ada peningkatan dalam produktifitas perekonomian kota?

## **Pedoman wawancara**

### **Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai**

Nama : M. Affan

Umur : 40 Tahun

Jabatan : Pelda Sekretariat

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Adanya tujuan dan sasara yang ingin dicapai dalam peimplementasian**

1. Menurut Bapak Apakah tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan

Binjai Smart City?

Jawaban : Penyelenggaraan Binjai Smart City adalah program dari Pemerintah Binjai yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan

2. Menurut bapak bagaimana strategi yang dibangun dalam pelaksanaan program binjai smart city?

Jawaban : Pemerintah Daerah harus dapat berlandaskan prinsip-prinsip good governance. Pemerintah daerah harus lebih berusaha sendiri dengan kaidah-kaidah yang ada. Dengan adanya Survei Kondisi Eksisting dari Perangkat Software dibidang teknologi informasi serta analisisnya

direncanakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berhubungan dalam penyusunan berbagai kebijakan dibidang teknologi informasi khususnya dilingkup pemerintahan daerah khususnya dalam menunjang pelaksanaan dan pengimplementasian e-government dan Smart City.

3. Menurut bapak Apa pengaruh kualitas kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya melalui pembangunan infrastruktur dalam program binjai smart city?

Jawaban : Sudah, infrastruktur dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

4. Menurut bapak Apakah ada kendala dalam pengimplementasian program binjai smart city?

Jawaban : Ada,

#### **b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan**

1. Menurut bapak Pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan binjai smart city?

Jawaban : Pemerintah Kota Binjai yaitu Walikota, Sekretaris Daerah, OPD (Organisasi perangkat daerah) dan berbagai Dinas- dinas terkait dalam pelaksanaan Binjai Smart City saling bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Binjai Smart City, Pemerintah Kota Binjai juga bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu dari Politeknik Negeri Medan sebagai institusi pendidikan, PT. Telkom dan PLN dari dunia industri.

2. Menurut bapak Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab dari dinas komunikasi dan informatika kota binjai?

Jawaban : dinas dan semua pihak yang terlibat bertanggungjawab

3. Menurut bapak Bagaimana cara yang diambil apabila ada kendala-kendala dalam pengimplementasian binjai smart city?

Jawaban : adanya strategi yang diambil seperti koordinasi.

4. Menurut bapak Apakah ada penilaian tugas dan fungsi dari kepala daerah?

Jawaban : ada,

### **c. Adanya program yang dilaksanakan dalam implementasi**

1. Menurut bapak Apa saja pelayanan digital yang ada dalam program binjai smart city?

Jawaban : ada beberapa aplikasi binjai smart city seperti e masyarakat, edokter, era, emusrenbang dll.

2. Menurut bapak Apa Bagaimana strategi yang dibangun dalam program binjai smart city oleh dinas komunikasi dan informatika kota binjai?

Jawaban : koordinasi, monitoring, dan analisis.

3. Menurut bapak Apa Sarana apa saja yang dipakai dalam program binjai smart city?

Jawaban : ada aplikasi binjai smart city, dan transportasi transbinjai

4. Menurut bapak Apakah program binjai smart city sudah efektif?

Jabawab : sudah.

### **d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera berkeadilan ( pertanyaan untuk masyarakat)**

1. Apakah indikator dari masyarakat yang sejahtera berkeadilan?



2. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat terhadap berlangsungnya program binjai smart city?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program binjai smart city?
4. Apakah ada peningkatan dalam produktifitas perekonomian kota?

## **Pedoman wawancara**

### **Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai**

Nama : Ahmad Rizal  
Umur : 38 Tahun  
Jabatan : Kasi Aplikasi dan Data Base

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Adanya tujuan dan sasara yang ingin dicapai dalam peimplementasian**

1. Menurut Bapak Apakah tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan Binjai Smart City?

Jawaban : Bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan

2. Menurut bapak bagaimana strategi yang dibangun dalam pelaksanaan program binjai smart city?

Jawaban :dengan mengelola sumberdaya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau mengantisipasi kejadian yang tidak terduga.

3. Menurut bapak Apa pengaruh kualitas kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya melalui pembangunan infrastruktur dalam program binjai smart

city?

Jawaban : ifrastruktur berperan penting dalam penigkatan investasi dan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Infrastruktur merupakan roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi juga sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, seperti dalam peningkatan nilai konsumsi, produktivitas, tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja

4. Menurut bapak Apakah ada kendala dalam pengimplementasian program binjai smart city?

Jawaban : Ada,

#### **b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan**

1. Menurut bapak Pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggraan binjai smart city?

Jawaban : Pemerintah Kota Binjai yaitu Walikota, Sekretaris Daerah, OPD (Ogranisasi perangkat daerah) dan berbagai Dinas- dinas terkait dalam pelaksanaan Binjai Smart City saling bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Binjai Smart City, Pemerintah Kota Binjai juga bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu dari Politeknik Negeri Medan sebagai institusi pendidikan, PT. Telkom dan PLN dari dunia industri.

2. Menurut bapak Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab dari dinas komunikasi dan informatika kota binjai?

Jawaban : dinas dan semua pihak yang terlibat bertanggungjawab

3. Menurut bapak Bagaimana cara yang diambil apabila ada kendala-kendala dalam pengimplementasian binjai smart city?

Jawaban : adanya strategi yang diambil seperti koordinasi.

4. Menurut bapak Apakah ada penilaian tugas dan fungsi dari kepala daerah?

Jawaban : ada,

### **c. Adanya program yang dilaksanakan dalam implementasi**

1. Menurut bapak Apa saja pelayanan digital yang ada dalam program binjai smart city?

Jawaban : ada beberapa aplikasi binjai smart city seperti e masyarakat, edokter, era, emusrenbang dll.

2. Menurut bapak Apa Bagaimana strategi yang dibangun dalam program binjai smart city oleh dinas komunikasi dan informatika kota binjai?

Jawaban : dengan koordianasi dengan pihak pelaksana Binjai Smart City, bahwa dalam rangkaian organisasi itu terdapat suatu hubungan erat antara atasan atau pimpinan dan bawahan, sehingga akan terjalinlah sebuah program kerja yang efektif, dan hal itu tidak luput dari adanya suatu pengorganisaan dari sang pemimpin organisasi, selain itu monitoring yang merupakan bagian integral dari perencanaan yang sudah disusun, dengan Monitoring.

3. Menurut bapak Apa Sarana apa saja yang dipakai dalam program binjai smart city?

Jawaban : aplikasi binjai smart city, dan transportasi transbinjai

4. Menurut bapak Apakah program binjai smart city sudah efektif?

Jawaban : sudah.

**e. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera berkeadilan ( pertanyaan untuk masyarakat)**

1. Apakah indikator dari masyarakat yang sejahtera berkeadilan?
2. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat terhadap berlangsungnya program binjai smart city?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program binjai smart city?
4. Apakah ada peningkatan dalam produktifitas perekonomian kota?

## **Pedoman wawancara**

### **Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai**

Nama : Danu Hendrawan

Umur : 38 Tahun

Jabatan : Plt. Sarana dan Prasarana Jaringan

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Adanya tujuan dan sasara yang ingin dicapai dalam peimplementasian**

1. Menurut Bapak Apakah tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan Binjai Smart City?
2. Jawaban : Point dari sasaran BSC (*Binjai Smart City*) bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masayakat yang sejahtera dan berkeadilan.
3. Menurut bapak bagaimana strategi yang dibangun dalam pelaksanaan program binjai smart city?

Jawaban : Kami saling berkoordinasi dan menganalisa permasalahan

4. Menurut bapak Apa pengaruh kualitas kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya melalui pembangunan infrastruktur dalam program binjai smart city?

Jawaban : Sudah, infrastruktur dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

5. Menurut bapak Apakah ada kendala dalam pengimplementasian program binjai smart city?

Jawaban : Ada,

#### **b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan**

1. Menurut bapak Pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan binjai smart city?

Jawaban : Pemerintah Kota Binjai yaitu Walikota, Sekretaris Daerah, OPD (Organisasi perangkat daerah) dan berbagai Dinas- dinas terkait dalam pelaksanaan Binjai Smart City saling bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Binjai Smart City, Pemerintah Kota Binjai juga bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu dari Politeknik Negeri Medan sebagai institusi pendidikan, PT. Telkom dan PLN dari dunia industri.

2. Menurut bapak Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab dari dinas komunikasi dan informatika kota binjai?

Jawaban : dinas dan semua pihak yang terlibat bertanggungjawab

3. Menurut bapak Bagaimana cara yang diambil apabila ada kendala-kendala dalam pengimplementasian binjai smart city?

Jawaban : adanya strategi yang diambil seperti koordinasi.

4. Menurut bapak Apakah ada penilaian tugas dan fungsi dari kepala daerah?

Jawaban : ada,

**c. Adanya program yang dilaksanakan dalam implementasi**

1. Menurut bapak Apa saja pelayanan digital yang ada dalam program binjai smart city?

Jawaban : adalah aplikasi- aplikasi dari segi tools seperti Edokter, Emasyarakat, Eperizinan, ERA, EMusrenbang 2019, PPDB 2018, JDIH, PMKS, EUMKM, EOFFICE, ESDM, ETKD, EABSENSI, ETOURISM, KPU, Trans Binjai Web, Integrasi Data Kependudukan, dan Integrasi Data Kepegawaian, tidak hanya aplikasi atau tools tersebut dalam Program Binjai Smart City terdapat Trans Binjai sebagai salahsatu fasilitas transportasi untuk masyarakat.

2. Menurut bapak Apa Bagaimana strategi yang dibangun dalam program binjai smart city oleh dinas komunikasi dan informatika kota binjai?

Jawaban : koordinasi, monitoring, dan analisis.

3. Menurut bapak Apa Sarana apa saja yang dipakai dalam program binjai smart city?

Jawaban : adalah aplikasi- aplikasi dari segi tools, dan Trans Binjai sebagai salahsatu fasilitas transportasi untuk masyarakat.

4. Menurut bapak Apakah program binjai smart city sudah efektif?

Jabawab : sudah.



**d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera berkeadilan ( pertanyaan untuk masyarakat)**

1. Apakah indikator dari masyarakat yang sejahtera berkeadilan?
2. Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat terhadap berlangsungnya program binjai smart city?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program binjai smart city?
4. Apakah ada peningkatan dalam produktifitas perekonomian kota?

## **Pedoman wawancara**

### **Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai**

Nama : Linda Wati  
Umur : 36 Tahun  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Adanya tujuan dan sasara yang ingin dicapai dalam peimplementasian**

1. Apa tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan binjai smart city?
2. Bagaimana strategi yang dibangun dalam pelaksanaan program binjai smart city?
3. Apa pengaruh kualitas kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya melalui pembangunan infrastruktur dalam program binjai smart city?
4. Apakah ada kendala dalam pengimplementasian program binjai smart city?

#### **b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan**

1. Pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggraan binjai smart city?
2. Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab dari dinas komunikasi dan informatika kota binjai?

3. Bagaimana cara yang diambil apabila ada kendala-kendala dalam pengimplementasian binjai smart city?
4. Apakah ada penilaian tugas dan fungsi dari kepala daerah?

**c. Adanya program yang dilaksanakan dalam implementasi**

1. Apa saja pelayanan digital yang ada dalam program binjai smart city?
2. Bagaimana strategi yang dibangun dalam program binjai smart city oleh dinas komunikasi dan informatika kota binjai?
3. Sarana apa saja yang dipakai dalam program binjai smart city?
4. Apakah program binjai smart city sudah efektif?

**d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera berkeadilan (Pertanyaan untuk masyarakat)**

1. Menurut menurut Ibu Apakah indikator dari masyarakat yang sejahtera berkeadilan?

Jawaban : Program Binjai Smart City ini baru berjalan 3 tahun dan efeknya sangat kecil dirasakan oleh masyarakat yang berwirausaha, karena tolak ukur penting dalam penentuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, kesejahteraan sosial menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Menurut menurut Ibu Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat terhadap berlangsungnya program binjai smart city?

Jawaban : belum dapat dirasakan manfaatnya.

3. Menurut menurut Ibu Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program binjai smart city?

Jawaban : belum banyak yang menggunakan layanan Binjai Smart City.

4. Menurut menurut Ibu Apakah ada peningkatan dalam produktifitas perekonomian kota?

Jawaban : mengatakan adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sejauh ini belum berpengaruh terhadap produktifitas perekonomian Kota Binjai. penentuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi Masyarakat Kota Binjai.

**Pedoman wawancara**

**Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017**  
**Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas**  
**Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai**

Nama : Aulia Fitria Suchi

Umur : 21 Tahun

Jabatan : Wiraswasta

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**a. Adanya tujuan dan sasara yang ingin dicapai dalam peimplementasian**

1. Apa tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan binjai smart city?
2. Bagaimana strategi yang dibangun dalam pelaksanaan program binjai smart city?
3. Apa pengaruh kualitas kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya melalui pembangunan infrastruktur dalam program binjai smart city?
4. Apakah ada kendala dalam pengimplementasian program binjai smart city?

**b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan**

1. Pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggraan binjai smart city?

2. Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab dari dinas komunikasi dan informatika kota binjai?
3. Bagaimana cara yang diambil apabila ada kendala-kendala dalam pengimplementasian binjai smart city?
4. Apakah ada penilaian tugas dan fungsi dari kepala daerah?

**c. Adanya program yang dilaksanakan dalam implementasi**

1. Apa saja pelayanan digital yang ada dalam program binjai smart city?
2. Bagaimana strategi yang dibangun dalam program binjai smart city oleh dinas komunikasi dan informatika kota binjai?
3. Sarana apa saja yang dipakai dalam program binjai smart city?
4. Apakah program binjai smart city sudah efektif?

**d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera berkeadilan (Pertanyaan untuk masyarakat)**

1. Menurut menurut Ibu Apakah indikator dari masyarakat yang sejahtera berkeadilan?

Jawaban : Adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2. Menurut menurut Ibu Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat terhadap berlangsungnya program binjai smart city?

Jawaban : Program Binjai Smart City dirasa sudah banyak dirasakan manfaatnya selain praktis, yaitu masyarakat tidak perlu datang pada tempat pelayanan pengaduan atau mencari informasi di tempat tersebut,

tetapi bisa langsung mengetahui informasi dan mengurus masalah melalui aplikasi yang dapat diakses pada smartphone dan website Pemerintah Kota Binjai, hal ini dapat mempermudah urusan masyarakat.

3. Menurut menurut Ibu Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program binjai smart city?

Jawaban : Sudah banyak yang menggunakan layanan Binjai Smart City.

4. Menurut menurut Ibu Apakah ada peningkatan dalam produktifitas perekonomian kota?

Jawaban : ada,

## **Pedoman wawancara**

### **Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai**

Nama : Randi Permana

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Adanya tujuan dan sasara yang ingin dicapai dalam peimplementasian**

1. Apa tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan binjai smart city?
2. Bagaimana strategi yang dibangun dalam pelaksanaan program binjai smart city?
3. Apa pengaruh kualitas kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya melalui pembangunan infrastruktur dalam program binjai smart city?
4. Apakah ada kendala dalam pengimplementasian program binjai smart city?

#### **b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan**

1. Pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggraan binjai smart city?
2. Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab dari dinas komunikasi dan informatika kota binjai?
3. Bagaimana cara yang diambil apabila ada kendala-kendala dalam pengimplementasian binjai smart city?



4. Apakah ada penilaian tugas dan fungsi dari kepala daerah?

**c. Adanya program yang dilaksanakan dalam implementasi**

1. Apa saja pelayanan digital yang ada dalam program binjai smart city?
2. Bagaimana strategi yang dibangun dalam program binjai smart city oleh dinas komunikasi dan informatika kota binjai?
3. Sarana apa saja yang dipakai dalam program binjai smart city?
4. Apakah program binjai smart city sudah efektif?

**d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yang sejahtera berkeadilan (Pertanyaan untuk masyarakat)**

1. Menurut menurut Bapak Apakah indikator dari masyarakat yang sejahtera berkeadilan?

Jawaban : Adanya pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Binjai dan pelayanan yang baik dari pemerintah.

2. Menurut menurut Bapak Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat terhadap berlangsungnya program binjai smart city?

Jawaban : Manfaat yang dapat dirasakan dari Program Binjai Smart City ini oleh masyarakat yaitu, masyarakat dapat lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Binjai dan masyarakat dapat berinteraksi langsung dan mengkritik Pemerintah Kota Binjai apabila ada kendala yang dihadapi, dan hal itu dapat langsung dibaca dan direspon oleh Pemerintah Kota Binjai. Dengan adanya metode transparansi ini

masyarakat jadi lebih turut serta dan lebih mudah untuk berinteraksi dengan Pemerintah Kota Binjai.

3. Menurut menurut Bapak Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program binjai smart city?

Jawaban : Sudah banyak yang menggunakan layanan Binjai Smart City.

4. Menurut menurut Bapak Apakah ada peningkatan dalam produktifitas perekonomian kota?

Jawaban : ada,



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 128/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019  
Lampiran : -  
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 25 Jumadil Awal 1440 H  
31 Januari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Kesbangpol Kota Binjai**  
di-  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **IGA CYNTIA PUTRI**  
N P M : 1503100094  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BINJAI SMART CITY DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.  
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



**Dr. ZULFARIMI, M.I.Kom.**



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl.Jend.Gatot Subroto No. 65 Telp. 061 - 8823619 Fax. 061 - 8823619  
Binjai 20717

Binjai, 06 Februari 2019

Nomor : 070 - 210  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Izin  
Penelitian

Kepada Yth :  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Di:  
Medan

**REKOMENDASI**

Sehubungan dengan surat pemberitahuan penelitian Nomor : 128/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal 31 Januari 2019 perihal tersebut diatas, kepada :

Nama : Iga Cyntia Putri  
N P M : 1503100094  
Alamat : Jl. Bukit Barisan 1 Medan Timur  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai  
Judul : " *Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai*".  
Lamanya : 2 (dua) Bulan  
Penanggung Jawab : Drs.Zulfahmi., M.I.Kom

Berkenaan dengan hal tersebut, pihak kami tidak menaruh keberatan dengan catatan sebagai berikut :

- Untuk Pengawasan diminta surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota Binjai c/q Sekretaris Daerah Kota Binjai supaya tembusannya diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Binjai
- Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/per aturan yang berlaku dan menjaga keamanan/ketertiban umum.
- Selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah berakhir mengadakan Penelitian Lapangan, diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Binjai.

Demikian untuk dimaklumi.



- Tembusan :**
1. Bapak Walikota Binjai (sebagai laporan)
  2. Kepala Bappeda Kota Binjai
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
  - ④ Yang Bersangkutan
  5. Arsip



PEMERINTAH KOTA BINJAI  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Jenderal Sudirman, No.6 Telepon 8821784 – 8821748  
BINJAI - 20714

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070 - 1450

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan setelah membaca/memperhatikan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 128/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa dan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai Nomor 070 - 210 tanggal 06 Februari 2019 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini kami berikan Izin Penelitian kepada:

Nama	: Iga Cyntia Putri
NPM	: 1503100094
Alamat	: Jl. Bukit Barisan 1 Medan Timur
Pekerjaan	: Mahasiswi
Kewarganegaraan	: Indonesia
Judul	: <b>Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai</b>
Peserta	: Sendiri
Tempat Penelitian	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
Lamanya	: 2 (dua) bulan
Penanggung Jawab	: Drs. Zulfahmi, M.I.Kom

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu harus melapor dan berkonsultasi kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi di tempat penelitian.
2. Harus mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di wilayah Kota Binjai.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penelitian.
4. Hasil lengkap penelitian sebanyak 2 (dua) set harus sudah diserahkan kepada Walikota Binjai (c.q. **Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Binjai**) dan dalam bentuk format PDF ke email [litbang.bappedakotabinjai@gmail.com](mailto:litbang.bappedakotabinjai@gmail.com) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai dilakukan.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan batal atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Kota Binjai apabila pemegang izin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Surat Izin Penelitian ini berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bersedia mematuhi  
Ketentuan Butir 1 s.d 6

  
Iga Cyntia Putri

Dikeluarkan di Binjai  
pada tanggal 22 Februari 2019

An. WALIKOTA BINJAI  
SEKRETARIS DAERAH KOTA



M. MAHFULLAH P. DAULAY, S.STP, M.AP  
REMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19770924 199711 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bapak Walikota Binjai, sebagai laporan.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



PEMERINTAH KOTA BINJAI  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Jenderal Sudirman No. 6  
BINJAI - 20713

Binjai, 22 Maret 2019

Nomor : 000 - 0157  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Telah Selesai Melaksanakan Izin Penelitian

Kepada Yth:  
Dekan UMSU  
di-  
Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa benar mahasiswa :

Nama : Iga Cntya Putri  
NPM : 1503100094  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian SKRIPSI di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai.

Demikian disampaikan dan diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA BINJAI



H.AHMAD ILHAM, SH, M. AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19651107 199803 1 004





Logo Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Bila memuat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.066/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : 13 Desember 2018 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **IGA CYNTIA PUTRI**  
N P M : 1503100094  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 53  
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BINJAI SMART  
CITY DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA  
BINJAI**  
Pembimbing : **RAFDINAL, S.Sos., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal : 13 Desember 2019.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 10 Rabiul Akhir 1440 H  
18 Desember 2018 M

Dekan  
  
**Dr. Alim Saif, S.Sos., MSP.**

Tembusan:

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





Changai Citias of Tempuras  
Bila menlewat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 7 JANUARI 2019.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : IGA CYNTHIA PUTRI  
N P M : 1503100094  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 935.../SK/II.3/UMSU-03/F/2018... tanggal 13 DESEMBER 2018... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BINJAI SMART CITY DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BINJAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

( RAFOUNAL S. SOE M. AP )

Pemohon,

( IGA CYNTHIA PUTRI )



**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 021/KEP/II.3-AU/UMSU-03/IF/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Hari, Tanggal : Jumat, 11 Januari 2019  
W a k t u : 08.00 WIB s/d. selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU  
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.I.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa/Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen/Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal/Skrripsi
16	NOVITA AMALIA	1503100035	AHMAD HIDAYAH DALUMUNTHE, Drs., M.Si., H.	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
17	SHEILA PRATIWI	1503100037	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	RAFDINAL, S.Sos., M.AP	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSJ) DALAM RANGKA PEMBERIAN SERTIFIKAT TANAH GRATIS DI KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN
18	IGA CYNTHIA PUTRI	1503100094	LEYLIA KHAIRANI, Dr.	RAFDINAL, S.Sos., M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BINJAI SMART CITY DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
19	MARTIN SAFRIYANDI SIAHAAN	1403100102	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	A. HIDAYAH DLT, Drs., H., M.Si	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM LANJUT USIA (LANSIA) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG
20	WIJI RAHAYU NINGSIH	1503100071	RAFDINAL, S.Sos., M.AP.	Drs. BANGUN NAPTUPULU, M.Si., H.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP KINERJA KARYAWAN PTP. NUSANTARA IV ADOLINA DI KOTA PERBALINGAN

Medan, 03 Jumadil Awwal 1440 H

08 Januari 2019 M

Dekan  
Dekan Dekan  
Drs. ZULFAHMI, M.Kom.





*Zhaghal, Cerdas & Terpercaya*  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Iga Cynthia Putri  
N P M : 1503100094  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Binjai Smart City Di Area Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	5-1-2019	- Pembacaan dan supervisi latar belakang masalah - Pembacaan dan supervisi cara penulisan Skripsi sesuai Peraturan Pembaca Skripsi	<i>Rafinal</i>
2	6-1-2019	- Pembacaan kerangka konsep dan kerangka isi - Pembacaan Daftar Pustaka	<i>Rafinal</i>
3	7-1-2019	Ace Amni - Proposal	<i>Rafinal</i>
4	26-1-2019	- Pembacaan kembali: Cover halaman judul - Pembacaan: Elemen awal bab - Pembacaan: kerangka konsep	<i>Rafinal</i>
5	28-1-2019	- Supervisi dan Pembacaan wawancara	<i>Rafinal</i>
6	29-1-2019	- Pembacaan wawancara agar digunakan	<i>Rafinal</i>
7	27-2-2019	- Supervisi dan Pembacaan Bab isi, termasuk Pembacaan Metode Penelitian (teori dan kebidanan)	<i>Rafinal</i>
8	1-3-2019	- Pembacaan Simpulan dan saran, Daftar Pustaka - melengkapi kaca pengantar dan daftar isi	<i>Rafinal</i>
9	5-3-2019	Ace Skripsi sesuai dengan arahan	<i>Rafinal</i>

Medan, 8 Maret ..... 2019...

Dekan,  
*(Dr. ARIFIN SALEH.....)*

Ketua Program Studi,  
*(Nolul Khairah.....)*

Pembimbing ke : ....  
*(Rafinal.....)*





Unggul, Cerdas, dan Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.-  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, .....2019..

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Iqa Cynthia Putri  
N P M : 1503120094  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Alamat rumah : Jl. Bukit Sawan I No. 29 Medan Timur Kota Medan  
Sumatera Utara ..... Telp : 08223224441

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap 2;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
14. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 4 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 2).

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, Wassalam.

Pemohon,  
  
(Iqa Cynthia Putri.....)

Disetujui oleh ;

Medan, 8 Maret .....2019..

Medan, 8 Maret .....2019..

Dekan,  
  
(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,MSP)

a.n.Rektor,  
Wakil Rektor - I  
(Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.Hum)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

SK-7

SURAT PERNYATAAN

*Bismillahirrohmanirrohiem.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama lengkap : Iga Cynthia Putri  
Tempat, tgl. lahir : Pekanbaru, 25 September 1997  
Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha\*  
Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda\*  
N P M : 1505100094  
Alamat Rumah : Jl. Bukit Bawean 1 No 29, Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara Telp/HP. 082233234441  
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa / Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Alamat Kantor :  
Telp/HP. ....

melalui surat permohonan tertanggal ..... telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan,

Meterai  
tempel  
Rp. 6000

  
IGA CYNTHIA PUTRI





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI  
Nomor : 384/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019  
Waktu : 07.45 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	IGA CYNTHIA PUTRI	1503100094	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	Drs. BANGUN NAPTUPULLU, M.SI	RAFINAL, S.Sos, MAP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN BINA SMART CITY DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
12	ANIS MARSELLA	1503100039	SYAFRIZAL, M.SI, Ph.D.	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI DINAS TENAGA KERJA SIMALUNGUN
13	MONICA ZEIN	1503100013	Drs. R. KUSNADI, MAP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOOPERASI, DAN UKM DALAM MELAKUKAN STABILISASI HARGA DI PASAR KABUPATEN BIREUN
14	DWI RIZKY INDRIANI	1503100040	Drs. R. KUSNADI, MAP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	NALLI KHAIRIHAH, S.IP, MPd	PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOMPOKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BAH JOGA SIMALUNGUN
15	SYARAS SARYANG PUTRI	1503100134	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.SI	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM RANGKA MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI DELU SERDANG

Menulis Sibang :

1.

Ditandatangani oleh :

REKTOR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Rektor  
DR. ARIFIN SALIH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris  
DR. ZULFAHMU, M.I.Kom

Medan, 04 Rabab 1440 H  
11 Maret 2019 M